

BAB 4 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penyadapan Australia

4.1.1 Penyadapan Australia Terhadap Indonesia

Badan Intelijen Negara (BIN) telah mengeluarkan pernyataan bahwa Australia telah melakukan tindakan penyadapan percakapan telepon sejumlah pemimpin Indonesia dalam kurun waktu 2007-2009 (*BBC*, 2013). Australia sendiri sebenarnya sudah lama melakukan tindakan penyadapan atau mata-mata terhadap Indonesia. Duta Besar Australia di Indonesia Sir Walter Crocker (1955-1956) dalam biografinya mengakui bahwa Lembaga Sandi Australia, Defense Signal Directorate (Australian Signal Directorate) secara rutin memecahkan dan membaca sandi diplomatik Indonesia sejak Pertengahan 1950 (*Manan*, 2013). Secara periodik penyadapan Australian terhadap Indonesia sebagai berikut.

Tabel 4.1 Rangkaian Penyadapan Australia Terhadap Indonesia
dari tahun 1950—2013

No	Penyadapan	Sasaran	Tahun
1	Australian Signal Directorate (ASD) mendirikan stasiun pertama badan intelijen Australia (ASIS) di Kedutaan Besar Australia di Jakarta	Memecahkan Sandi Diplomatik Indonesia	1950-an
2	Badan Intelijen Sinyal Inggris (GCHQ) membantu ASD memecahkan kunci alat sandi produksi Swedia, Hagelin, yang digunakan Kedutaan Besar Indonesia di Darwin Avenue, Canberra	Kedutaan Besar Indonesia untuk Australia	1960-an
3	Pos pemantauan Stasiun Penerima Shoal Bay di Darwin, yang dioperasikan jarak jauh di markas besar Defence Signal Directorate (DSD) di Russel Hill, Canberra	Komunikasi Militer Indonesia	1970-an

4	DSD mengoperasikan sinyal intersepsi dan Markas Pemantauan di Kepulauan Cocos, di Samudera Hindia (1.100 km Barat Daya Pulau Jawa	Radio Pengawasan, Pelacak Arah, dan Stasiun Satelit	1980-an
5	Australia bekerja sama dengan United States of America Agreement (UKUSA) dalam proyek pengintaian global bersandi <i>Echelon</i>	Australia Mendapatkan akses luas ke Komunikasi satelit dan Telepon	1990-an
6	DSD masih melakukan tindakan penyadapan kepada Indonesia	Komunikasi militer Indonesia	1999
7	Intelijen Australia dan Amerika mengumpulkan informasi kontak pejabat Indonesia saat konferensi perubahan iklim, di Bali. Operasi ini dilakukan dari sebuah stasiun di Pine Gap, yang dijalankan dinas intelijen Amerika, CIA, dan Departemen Pertahanan Australia	Pejabat dan Pemimpin Indonesia	2007
8	ASD mengoperasikan program bersandi Stateroom. Operasi pengintaian ini belakangan dilakukan dengan nama sandi "Reprieve".	Pejabat Indonesia	2013

Sumber: *Manan* (2013)

Teknologi dan peralatan Australia memanglah canggih dan memudahkannya untuk melakukan tindakan penyadapan. Agen mata-mata elektronik Australia *Defence Signals Directorate* (DSD) diperkirakan telah menguping komunikasi TNI AL dan militer Indonesia melalui pos rahasia di kepulauan Cocos (*Yunita*, 2013). Tindakan penyadapan dan spionase yang dilakukan Australia tidak sampai disitu, berdasarkan informasi yang dibongkar oleh Edward Snowden pada tahun 2007 mengatakan bahwa Australia telah menyadap presiden, ibu negara, dan sejumlah pejabat Indonesia. Kemampuan Australia dalam menyadap tidak hanya nama pejabat yang disadap akan tetapi Australia mampu mengetahui jenis ponsel yang digunakannya. Adapun jenis ponsel yang di pakai adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2 Jenis Ponsel Pejabat Indonesia yang disadap Australia

No	Nama Pejabat	Pejabat	Jenis Ponsel
1	Presiden SBY	Presiden RI	Nokia E90-1
2	Ibu Ani Yudhoyono	Ibu Presiden	Nokia E90-1
3	Hatta Rajasa	Mensesneg	Nokia E90-1
4	Sri Mulyani	Menko Perekonomian	Nokia E90-1
5	Sofyan Djalil	Menteri BUMN	Nokia E90-1
6	Boediono	Wakil Presiden	Blackberry Bold 9000
7	Dino Patti Djalal	Jubir Bid. Luar Negeri	Blackberry Bold 9000
8	Jusuf Kalla	Mantan Wapres	Samsung SGH-Z370
9	Andi malaranggeng	Jubir Presiden	Nokia E71-1
10	Widodo AS	Menkopolhukan	Nokia E66-1

Sumber: *Pasulina* (2015)

4.1.2 Respon Indonesia Terhadap Penyadapan

Tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Australia ini menimbulkan banyak respon, terutama respon Pemerintah memutuskan sementara hubungan diplomatik dengan Australia. Akan tetapi, respon ini tidak semuanya menyetujui. Sebagaimana M. Haripin, peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang menyatakan bahwa pemutusan hubungan diplomatik akan merugikan Indonesia di berbagai sektor, seperti: ekspor-impor, investasi, pendidikan, dan tenaga kerja ataupun agribisnis. Respon ini juga didukung oleh staf khusus presiden Bidang Luar Negeri, yang mengatakan bahwa pemutusan hubungan diplomatik dengan Australia adalah tindakan yang sangat ekstrim karena Indonesia masih perlu meningkatkan hubungan kerja sama dengan Australia dan melihat kepentingan nasional kedua Negara (*Laeis*, 2013). Sedangkan banyak pula yang mendukung tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriarto Sutarto, yang menilai bahwa Australia memiliki banyak kepentingan besar menjalin kerja sama dengan Indonesia. Australia lebih banyak bergantung pada Indonesia, diantaranya aspek keamanan territorial negara dimana apabila ada

negara dari utara mau menyerang Australia, maka harus melewati Indonesia terlebih dahulu. Hal senada juga diungkapkan oleh anggota komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari. Dia mengatakan Australia sangat membutuhkan Indonesia dalam memberikan informasi mengenai terorisme. Kemudian ditambahkan oleh anggota komisi 1 DPR RI Tantowi Yahya yang mengatakan bahwa tindakan penyadapan ini tidak boleh dipandang biasa karena menyangkut kedaulatan negara.

4.1.2.1 Kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia

Menyikapi tindakan penyadapan tersebut, pemerintah Indonesia merespon dengan beberapa kebijakan terhadap Australia:

a. Indonesia Meminta Penjelasan Resmi dari Pemerintah Australia

Banyak kalangan dari berbagai masyarakat menyerukan agar pemerintah mengambil tindakan tegas atas ulah yang diperbuat oleh Australia atas kasus penyadapan tahun 2013. Pemerintah sendiri dengan tegas meminta penjelasan resmi dari pemerintah Australia mengenai masalah tersebut. Dalam keterangan pers di kantor kepresidenan, Presiden SBY menyatakan,

“.....Kalau Australia ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia ini ke depan, saya masih tetap menunggu penjelasan dan sikap resmi dari Australia. Dan berkaitan dengan itu, insya Allah, malam ini juga, saya akan mengirim surat kepada Perdana Menteri Tony Abbott. Surat resmi saya, yang sudah kita persiapkan untuk sekali lagi, memintakan penjelasan dan sikap resmi Australia terhadap kejadian penyadapan itu” (*Humas Setkab*, 2013).

b. Pemanggilan duta besar Indonesia untuk Australia

Melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa, Indonesia menegaskan penyadapan itu berdampak sangat serius terhadap hubungan Indonesia dan Australia. Memutuskan untuk memanggil duta besar Indonesia untuk Australia di Canberra. Karena sangat tidak mungkin

duta besar mampu bekerja pada saat hubungan kedua negara sedang tidak lazim dan ditengah suasana yang sangat mengganggu ini.

c. Pemerintah Indonesia mereview dan menghentikan sejumlah kerja sama

Adapun kerja sama yang dihentikan atas instruksi dari presiden SBY adalah:

- a. Menghentikan sementara kerja sama pertukaran informasi dan pertukaran intelijen antara kedua negara.
- b. Menghentikan latihan-latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara maupun latihan yang sifatnya gabungan.
- c. Menghentikan *coordinated patrol military operation*, Yaitu kerja sama dalam menghadapi permasalahan bersama, *people smuggling* yang merepotan Indonesia dan Australia di wilayah lautan.

d. Indonesia meminta Protokol *Code of Conduct* (COC) Menyangkut Kerja sama dengan Australia di berbagai bidang

Indonesia meminta untuk keberlanjutan kerja sama di masa depan akan ada semacam protokol *code of conduct*. Presiden mengatakan, protokol itu, (*code of conduct*) tersebut nantinya bersifat mengikat, jelas, dan kemudian dijalankan. Keperluan protokol tersebut untuk membangun kembali kepercayaan Indonesia terhadap Australia.

Keseriusan pemerintah Indonesia menyikapi tindakan penyadapan tersebut akhirnya terjawab setelah Perdana Menteri Australia Tony Abbott menanggapi surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Presiden SBY terdapat 3 substansi dalam surat Perdana Menteri Tony Abbott dalam menjawab tentang penyadapan yang dilakukan Australia:

- a. Pemerintah Australia menyatakan ingin terus menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral kedua negara yang sesungguhnya berada dalam keadaan yang kuat dan berkembang.

- b. Komitmen PM Australia bahwa Australia tidak akan melakukan sesuatu pada masa depan yang akan merugikan dan mengganggu Indonesia.
- c. PM Australia setuju dan mendukung usulan untuk menata kembali kerja sama bilateral, termasuk pertukaran intelijen namun dengan protokol dan kode etik yang jelas, adil, dan dipatuhi.

Dalam perkembangan selanjutnya, adanya tanggapan dari pemerintah Australia dengan memberikan penjelasan bahwa Australia masih menginginkan kelanjutan hubungan diplomatik dengan Indonesia

e. Enam Langkah *Roadmap* Pemerintah Indonesia Terhadap Australia

Dalam keterangan pers presiden pada tanggal 26 November 2013. Presiden SBY menyampaikan 6 (enam) langkah *roadmap* yang akan dilakukan pemerintah Indonesia untuk memulihkan kembali hubungan dengan Australia pasca penyadapan.

Roadmap pemerintah Indonesia tersebut adalah:

- a. Menugasi Menteri luar negeri atau utusan khusus untuk membicarakan secara mendalam isu-isu yang sensitive yang berkaitan dengan hubungan Indonesia-Australia pascapenyadapan
- b. Setelah terjadi *understanding*, dan muncul *agreement* dari kedua belah pihak, diharapkan akan ditindaklanjuti dengan pembahasan protokol dan kode etik secara lengkap dan mendalam;
- c. Presiden SBY akan memeriksa sendiri draft protokol dan kode etik itu apakah sudah memadai dan menjawab keinginan Indonesia pascapenyadapan yang lalu;
- d. Setelah protokol dan kode etik itu selesai dipersiapkan, pengesahannya dapat dilakukan dihadapan para pemimpin pemerintahan, yang dihadiri oleh Presiden SBY maupun PM Australia Tony Abbott.
- e. Tugas kedua negara selanjutnya adalah membuktikan bahwa protokol dan kode tersebut dapat terlaksana.

f. Setelah kedua negara, utamanya Indonesia memiliki kembali kepercayaan atau trust dan kemudian protokol serta kode etik itu benar-benar dijalankan maka kerja sama bilateral yang nyata-nyata membawa manfaat bersama dapat dilanjutkan, termasuk diplomasi pertahanan dan kepolisian kedua Negara

f. Indonesia mendukung Resolusi Anti Spionase dalam sidang umum PBB yang diajukan Jerman dan Brazil

Kasus penyadapan juga dialami oleh Jerman dan Brazil dan Prancis yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Pada awalnya, Jerman tidak memberikan kritik terbuka karena tidak ingin hubungan kedua negara terganggu. Namun, setelah mengetahui laporan tentang penyadapan telepon Kanselir Jerman Angela Merkel, pemerintah Jerman akhirnya melakukan kritik tajam dan protes diplomatik yang cukup keras dengan cara memanggil Duta Besar AS John B. Emerson di Berlin untuk memberikan keterangan. Sama halnya dengan Pemerintah Jerman, pemerintah Perancis pun memanggil Duta Besar AS Charles Rivkin di Paris terkait aksi penyadapan yang dilakukan oleh AS. Presiden Perancis Francois Hollande menuntut agar aksi penyadapan dihentikan.

Pemerintah Jerman dan Brasil pun membawa isu penyadapan ini ke tingkat pemimpin dunia. Pemerintah Jerman dan Brasil membawa isu penyadapan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendukung pembatasan spionase. Bahkan kedua negara mengusulkan pembuatan draf resolusi Majelis Umum PBB untuk pengawasan khusus yang menjamin transparansi dan akuntabilitas pengintaian komunikasi negara. Resolusi ini diperlukan agar terdapat garis batas yang jelas antara isu keamanan yang sah dan hak privasi individu.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan Indonesia turut mendukung resolusi anti-spionase yang diajukan oleh pemerintah Jerman dan Brazil di Sidang Umum PBB. Bentuk dukungan Indonesia itu disampaikan dengan menjadi Co-sponsor bagi rancangan resolusi yang meminta penghentian spionase internet dan pelanggaran

privasi. Menlu Marty berharap resolusi itu bisa memastikan pemerintah manapun tidak lagi melakukan aksi spionase terhadap Indonesia dan negara lainnya. Resolusi Majelis Umum PBB ini tidak mengikat, tidak seperti resolusi Dewan Keamanan PBB yang terdiri dari 15 negara. Namun resolusi ini bisa mendapat dukungan luas dari 193 negara anggota PBB sehingga membawa bobot moral dan politik. Sebanyak 55 negara telah menjadi Co-sponsor terhadap resolusi ini. Dalam resolusi itu menekankan bahwa pengawasan yang dilakukan secara semena-mena dan tak berdasarkan hukum merupakan pelanggaran berat terhadap hak privasi. Hal serupa juga berlaku untuk aksi penyadapan, karena hal itu turut melanggar kebebasan berekspresi.

4.2 Analisis Data dan Interpretasi Hasil

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian beserta interpretasi berdasarkan data yang didapatkan selama melakukan penelitian lapangan. Data yang diperoleh berupa wawancara dengan narasumber terkait dengan topik dan sumber lain seperti buku, jurnal, berita, website, dan lain sebagainya.

Hubungan Indonesia dan Australia pascakasus penyadapan memang sangat dinamis meskipun banyak meyakini bahwa pascapenyadapan tidak akan ada lagi masalah-masalah yang dihadapi. Kenyataannya masalah-masalah yang menyulut ketegangan kedua negara masih saja terjadi. Sehingga pada sub bab ini dibahas masalah-masalah apa saja yang membuat hubungan Indonesia dan Australia selalu naik dan turun pascakasus penyadapan tahun 2013. Kemudian selanjutnya akan dibahas bentuk diplomasi pertahanan yang dilaksanakan antara Indonesia dan Australia pascakasus penyadapan tahun 2013.

4.2.1 Naik-turun Hubungan Indonesia-Australia Pascakasus Penyadapan Tahun 2013

Sebagai Negara yang bertetangga, Indonesia dan Australia banyak sekali mengalami interaksi yang menimbulkan banyak gesekan. Hal ini tidak lepas dari kondisi fisik dan geografis antara Indonesia dan Australia yang berdekatan sehingga menyebabkan hubungan kedua Negara sering mengalami naik dan turun. Seperti yang dijelaskan oleh Letkol Hafiz selaku staf Paban V Asops Kasal mengatakan bahwa masalah yang muncul dengan Indonesia tentu saja sering terjadi dengan Negara yang berbatasan langsung dengan kita termasuk salah satunya Australia (Wawancara 16 Oktober 2017).

“.....”Jadi Australia dan Indonesia, hubungannya seperti roller coster. Kadang naik pelan kemudian turun tajam kemudian muter lagi. Itu hal yang biasa. Kan sudah saya bilang sebelumnya bahwa yang sering berantem itu ya tetangga. Kira2 kita sering konflik dengan Negara tetangga atau yang bukan tetangga? Hampir tidak. malah yang sering adalah tetangga yang mempunyai kepentingan dinegara kita. Kalau tidak ada kepentingan dan bukan tetangga saya kira kecil sekali konfliknya. Contoh kecil Anda dengan tetangga sebelah yang rebutan pohon. Ini pohon punya siapa nih? Ada buahnya. Terus parkir, mobil anda tiga mobil sebelah satu, anda mengambil lahanya dia untuk parkir. Jadi semua itu ada kepentingannya terutama dari Negara yang berdekatan”

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Mayor Gede selaku staf kerja sama militer mabesad dalam keterangannya pada saat wawancara langsung dengan peneliti yang mengatakan bahwa:

“.....Australia merupakan salah satu bagian Negara tetangga kita dan dipandang memiliki nilai startegis dan mempunyai potensi kerjasama bilateral yang cukup besar. Dalam hal ini kami melihat manfaat yang didatangkan dari menjalin hubungan bilateral

dengan angkatan darat Australia ini cukup besar kepada Negara kita begitu juga terhadap Australia sendiri. Australia juga memandang kita Negara Indonesia ini sebagai Negara partner yang penting karena mempunyai lokasi yang strategis berada diantara dua samudera dan dua benua”

Kondisi geografis memang menjadi faktor penting yang mempengaruhi hubungan Indonesia dan Australia. Kondisi tersebut membuat Indonesia dan Australia semakin banyak melakukan interaksi baik yang memberikan dampak positif maupun negatif. Hal inilah yang menyebabkan hubungan Indonesia dan Australia selalu mengalami kondisi yang dinamis naik dan turun.

Australia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia di bagian selatan. Sebagai akibat dari masalah penyadapan, banyak yang meragukan apakah Australia benar-benar merupakan teman Indonesia atau hanya musuh yang sembunyi didalam selimut. Pengaruh kasus penyadapan yang terjadi pada tahun 2013 memang menjadi salah satu permasalahan serius yang mengancam hubungan Indonesia dan Australia seperti yang dikatakan oleh Riaz Saehu selaku kapala direktur Asis Pasifik dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Indonesia (wawancara 21 Desember 2017):

“.....Kasus tersebut (Penyadapan) berdampak pada pemanggilan Dubes Indonesia untuk Australia kembali ke Jakarta dan meninggalkan Australia untuk beberapa waktu. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menanggapi masalah kasus penyadapan dengan sangat serius”

Terungkapnya kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia telah menyebabkan hubungan Indonesia dan Australia menurun dan sempat mengganggu beberapa kerja sama bilateral kedua negara. Hal yang senada juga dikeluarkan oleh Kolonel Mugiono selaku kepala bagian

penerangan Pusat penerangan Mabes TNI melalui wawancara langsung 15 Desember 2017 yang mengatakan bahwa "...TNI atas perintah panglima TNI harus melakukan evaluasi terhadap beberapa diplomasi pertahanan dengan Australia yang sedang berjalan". Akibat kasus penyadapan tersebut terdapat beberapa pemutusan hubungan diplomasi pertahanan dengan Australia hingga waktu yang tidak di tentukan.

Kasus penyadapan memang menjadi masalah serius yang mengancam hubungan Indonesia dan Australia. Tidak hanya itu, diplomasi pertahanan Indonesia dan Australia juga mengalami dampak atas permasalahan yang terjadi. Upaya penyelesaian masalah penyadapan memang dilaksanakan oleh kedua Negara baik Indonesia yang menuntut untuk ditanda tangannya COC tentang penyadapan maupun Australia yang meminta maaf kepada Indonesia atas kejadian penyadapan tersebut.

Disisi lain, komunikasi antar pemimpin negara juga memberikan kontribusi besar dalam pengaruh naik dan turunnya hubungan Indonesia dan Australia pascakasus penyadapan. Hal ini tidak lepas dari komunikasi politik anatar pemimpin merupakan *representative* kebijakan politik Negara yang menentukan tindakan negara terhadap negara lain.

Komunikasi politik antar pemimpin dalam penyelesaian kasus penyadapan adalah pertemuan presiden SBY dengan Perdana Menteri Australia Tony Abbott. Disisi lain, kedua menteri luar negeri Indonesia dan Australia juga tengah sibuk membahas kode tata kelakuan baik (*Code of Conduct*). COC ini akhirnya terumuskan sehingga membuat Indonesia dan Australia sepakat untuk menandatangani kode etik tentang kerangka kerja sama keamanan. Kode etik ini bernama "Kesepahaman Bersama mengenai suatu tata perilaku antara Republik Indonesia dan Australia dalam pelaksanaan perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia tentang kerangka kerja sama keamanan "Traktat Lombok".

Dalam kesepakatan ini, ada dua poin yang dihasilkan, yaitu:

1. Para pihak tidak akan menggunakan setiap intelijen mereka, termasuk kapasitas penyadapan atau sumber-sumber daya lainnya, dengan cara-cara yang dapat merugikan kepentingan dari para pihak.
2. Para pihak akan mendorong kerja sama intelijen antara lembaga-lembaga dan badan-badan yang relevan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing.

Kesepakatan ini faktanya telah membawa hubungan Indonesia dan Australia kembali membaik. Ini dibuktikan dengan hubungan kedua negara yang tidak lagi tegang dan berbagai kerja sama yang telah dibekukan sudah kembali berjalan seperti sedia kala, seperti kerja sama latihan militer bersama antara tentara Indonesia dan Australia baik angkatan darat, laut, maupun udara yang sifatnya gabungan, *coordinated military operation*, terorisme, dan lain-lain seperti yang diungkapkan oleh Mayor Gede selaku staf diplomasi pertahanan TNI AD.

Dukungan senada juga diberikan oleh Riaz Saehu selaku Direktur Asia Pasifik Dirjen Asia Pasifik dan Afrika kementerian luar negeri yang mengatakah bahwa Pascakasus penyadapan duta besar Indonesia untuk Australia di Canberra kembali bekerja yang menandakan hubungan Indonesia dan Australia kembali membaik.

Dengan penandatanganan COC penyadapan merupakan akhir penyelesaian permasalahan yang sudah membelenggu Indonesia dan Australia. Kerja sama Indonesia dan Australia dibidang bilateral maupun militer dapat terus dijalankan dan dikembangkan demi kemajuan kedua negara dan mencapai kepentingan nasionalnya.

Melihat dari pentingnya hubungan Indonesia dan Australia tidak dapat dilepaskan dari kepentingan nasional masing-masing Negara. Sehingga pada dasarnya hubungan Indonesia dan Australia adalah sebuah tujuan utama dalam mencapai kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan faktor penting dalam melakukan kerja sama yang saling menguntungkan. Kepentingan nasional Indonesia sudah termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat yang meliputi empat poin

yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

4.2.1.1 Hubungan Indonesia-Australia menanggapi masalah *Bali Nine*

Ketegangan hubungan Indonesia-Australia kembali mengalami ketegangan di tahun 2015 saat Indonesia menjatuhkan hukuman eksekusi mati terhadap dua warga negara Australia yakni Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Hal ini diungkapkan oleh Letkol Hafiz selaku staf Spaban V Sopsal yang mengatakan bahwa “.....penegakan hukum di Indonesia yang menyangkut narkoba sangat tegas dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi siapapun pelakunya”.

Penjelasan senada juga diungkapkan oleh Riaz Saehu yang mengatakan bahwa pemerintah Jokowi memang sangat *concern* terhadap pemberantasan narkoba dan tidak akan memberikan ampun terhadap siapapun yang melanggarnya sesuai dengan program Nawacita (wawancara 21 Desember 2017). Keterangan yang sama juga ditambahkan oleh Kolonel Doli Hutabarat yang mengatakan bahwa:

“.....Kasus Bali Nine ini menunjukkan posisi Indonesia terkait masalah narkoba sangat serius. Lihat Filipina yang sudah mengeksekusi banyak pelaku pelanggaran narkoba dinegaranya. Berapa banyak generasi kita yang meninggal dan kehilangan masa produktif mereka hanya karena narkoba”. (wawancara 29 September 2017)

Ketegasan Indonesia dalam melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan narkoba sangat tegas. Hukuman yang seberat-beratnya akan diberikan kepada siapapun yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan pengedaran narkoba di Indonesia. Keterlibatan dua warga Negara Australia dalam kasus narkoba *Bali Nine* membuat Australia

melakukan protes keras untuk menyelamatkan atau meringankan hukuman dua warga negaranya sehingga ketegangan hubungan kedua negara tidak dapat terelakkan kembali setelah hubungan baik yang baru saja dicapai.

Ketegangan akibat munculnya kasus *bali nine* menurut pakar akademisi hubungan Internasional hanya pada taraf elit politik kedua Negara saja atau pemerintahan (*Rastika, 2015*). Posisi Indonesia tetap pada jalur hukum yang berlaku tanpa intervensi dari pihak lain khususnya Australia. Indonesia didesak agar segera melakukan hukuman eksekusi agar permasalahan semakin tidak berlarut-larut.

Hubungan *people to people* antara masyarakat Indonesia dan masyarakat Australia tidak mengalami begitu dampak atas kebijakan pemerintah Indonesia (*Riaz Saehu, Komunikasi personal, 21 Desember 2017*). Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah wisatawan Australia yang mengunjungi Indonesia tidak mengalami perubahan bahkan mengalami peningkatan pada triwulan satu tahun 2015 sebesar 14,27% yakni sebesar 237.077 wisatawan Australia (*Buku Statistik Indonesia, 2014*). Begitu juga dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di Australia tidak ada yang mengalami deskriminasi atau ancaman dari masyarakat Australia. Masyarakat banyak menyikapi kebijakan yang diambil Indonesia adalah bentuk kepentingan politik. Bagi Tony abbot, usaha untuk memperjuangkan warga negaranya mampu mendulang suara lebih banyak di Australia untuk kepentingannya dalam pemilu.

Indonesia meyakini bahwa penegakkan hukum yang ada harus dijalankan dengan benar dan akhirnya eksekusi hukuman mati tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 April 2015. Kebijakan eksekusi mati tersebut tidak lain sebagai upaya dalam memberikan efek jera terhadap Bandar atau pengedar narkoba di Indonesia. Kebijakan yang diambil presiden Jokowi bukannya tidak beralasan, hal ini dapat dilihat dari jumlah warga Negara Indonesia yang meninggal atas kasus narkoba sebanyak 50 jiwa atau sekitar 18.000 jiwa setiap tahun (*Sihombing, 2015*).

Kebijakan Australia sendiri dalam memperjuangkan dua warga negaranya dari hukuman mati Indonesia adalah dengan mengancam akan mengurangi jumlah dana bantuan atau donor untuk Indonesia. Hal ini dipertegas oleh menlu Australia Julie bishop bahwa Australia akan memangkas dana bantuan untuk Indonesia sebesar 600 juta dollar yang banyak dialokasikan untuk pendidikan, pembangunan sosial pedesaan, infrastruktur, kesehatan, dan pengurangan resiko bencana (*Ita*, 2015). Kebijakan lainnya adalah penarikan duta besar Paul Grigson sebagai bentuk upaya protes terhadap Indonesia.

Menanggapi kebijakan Australia tersebut, Indonesia lebih mengedepankan upaya diplomasi dan dialog. Diplomasi yang dilakukan Indonesia melalui tiga strategi yakni diplomasi antar-pemerintah, antar-pelaku bisnis, dan antar-masyarakat (*Sihombing L*, 2015). Hal tersebut dilakukan Indonesia karena melihat pengaruh aktor *non-state* terhadap hubungan bilateral Indonesia-Australia seperti pelaku bisnis dan masyarakat.

4.2.1.2 Hubungan Indonesia-Australia menanggapi masalah *Illegal Migrant*

Salah satu kebijakan kontroversial dibawah Pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbot adalah penerapan kebijakan maritime pada 18 September 2013. Kebijakan ini banyak memberikan pengaruh kurang baik terhadap Indonesia sehingga berdampak pada merenggangnya kembali hubungan Indonesia dan Australia.

Kebijakan *Operation Sovereign Borders* (OSB) atau Operasi kedaulatan perbatasan adalah operasi keamanan perbatasan yang dipimpin oleh pihak miter yang bertujuan untuk membasmi penyelundupan manusia dan melindungi batas-batas Negara Australia (*Australian Home Affairs*, 2013). Australia berkomitmen dalam mengakhiri kegiatan kejahatan penyelundupan manusia.

OSB diimplementasikan dalam tiga cara yaitu sosialisasi kewilayah Indonesia, membeli perahu-perahu di Indonesia terutama di daerah yang biasa digunakan untuk penyeberangan ke Australia, dan mendorong kembali perahu-perahu yang membawa *Illegal Migrant* ke perairan Indonesia.

Menurut Letkol Hafiz dalam wawancara 16 Oktober 2017 menjelaskan bahwa kebijakan pengembalian kapal perahu para pencari suaka ilegal timur tengah merugikan Indonesia karena perahu mereka diarahkan ke Indonesia. Hal ini didukung oleh keterangan Riaz Saehu yang mengatakan:

“.....masalah pengembalian kapal ilegal dari Australia ke Indonesia oleh angkatan laut Australia tentu membuat Indonesia merasa dongkol. Akan tetapi penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan cara-cara diplomasi yang menyakinkan Australia untuk bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut. Presiden memerintahkan instansi terkait untuk segera menyelesaikan masalah ini secepatnya agar hubungan Indonesia dan Australia tidak mengalami gangguan.” (wawancara 21 Desember 2017)

Dengan begitu Indonesia menolak dengan keras dan melakukan protes terhadap tindakan Australia tersebut. Indonesia meminta agar Australia dapat dengan bijak bersama-sama menyelesaikan masalah *illegal migrant*. Komunikasi bilateral antara Indonesia dan Australia terus dilakukan dalam hal pemberantasan *illegal migrant* karena masalah ini sangatlah memerlukan partisipasi dari kedua Negara

Indonesia dan Australia sendiri sebelumnya sudah mempunyai beberapa kerja sama bilateral khususnya menangani masalah *illegal migrant* (Maulana, 2016). Kerja sama tersebut sangat efektif dalam menekan jumlah *illegal migrant* yang masuk ke Australia maupun Indonesia. Akan tetapi, setelah kebijakan OSB tersebut dijalankan,

Indonesia merasa sangat dirugikan akibat kapal-kapal imigran yang memasuki Australia diputar balikkan ke Indonesia. Untuk menyelesaikannya, kedua pemimpin Negara lebih memilih dialog sebagai upaya penyelesaian masalah.

4.2.1.3 Hubungan Indonesia-Australia menanggapi masalah pelecehan lambang Indonesia oleh Australia

Drama hubungan Indonesia dan Australia belum berakhir pascakasus penyadapan. Hubungan Indonesia dan Australia memang seperti roller coaster dimana naik pelan kemudian turun tajam dan berputar putar (*Hafiz*, Komunikasi langsung, 16 Oktober 2017).

Hubungan Indonesia-Australia kembali tegang pada akhir tahun 2016 setelah adanya oknum perwira Australia yang melakukan pelecehan terhadap lambang Negara Indonesia di lembaga pendidikan militer perth, Australia. Menanggapi penemuan tersebut, TNI sebagai instansi yang mengajar pada lembaga tersebut langsung melaporkannya kepada panglima TNI dan menteri pertahanan Ryamizar Ryacudu. Pada hal ini TNI langsung melakukan pemutusan hubungan kerja sama hingga dilakukan investigasi atas penemuannya tersebut (*Asmara*, 2017).

Menurut Riaz Saehu yang ditemui saat wawancara menjelaskan bahwa dalam menanggapi kisruhnya hubungan instansi militer baik Indonesia maupun Australia membuat presiden Jokowi dan MP turnbull bertemu dan menegaskan bahwa hubungan kedua Negara dalam kondisi yang baik-baik saja. Presiden Jokowi memerintahkan panglima TNI dan menteri pertahanan untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Presiden Jokowi lebih menanggapi masalah ini dengan tenang dan menyakinkan masyarakat bahwa ada kesalahpahaman antara TNI dan *Australian Defence Force* (ADF). Australia kemudian meminta maaf atas kejadian tersebut melalui *Air Chief Marshal* Mark Binskin dan memberikan hukuman skorsing terhadap oknum militer Australia tersebut (Wawancara 21 Desember 2017).

Dalam menyelesaikan masalah ini terlihat presiden Jokowi dan PM Turnbull tidak terlalu menjadikan masalah ini sebagai masalah yang mengganggu hubungan bilateral. Kedua lebih menghargai satu sama lain dan lebih tenang. Setelah Australia meminta maaf dan Australia bersedia memperbiki kurikulum pendidikan militernya tersebut, masalah dianggap selesai yang pada akhirnya Kerja sama antara TNI dan Militer Australia kembali berjalan.

4.2.2 Diplomasi pertahanan Indonesia-Australia Pascakasus Penyardapan tahun 2013

Hubungan diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Australia pascakasus penyardapan adalah mengikuti kebijakan Pemerintah. Seperti dijelaskan oleh Letkol Sianturi yang mengatakan bahwa setelah masalah penyardapan dianggap selesai, diplomasi pertahanan antara TNI dengan militer Australia kembali berjalan (wawancara 29 September 2017). Dengan begitu kerja sama yang sempat terhenti seperti *Indonesia-Australia Defence Strategic Dialogue (IADSD)*, *Army to Army Talks*, *Navy to Navy Talks*, dan *Airman to Airman Talks* kembali berjalan seperti semula.

Keterangan tambahan juga diberikan oleh Mayor Gede selaku staf diplomasi pertahanan Mabesad dalam wawancara tanggal 26 September 2017 mengatakan bahwa:

“Hubungan militer antara TNI dan militer Australia sebenarnya tidak terlalu mengalami dampak negatif karena masalah penyardapan lebih condong kepada urusan masalah politik. yang dimaksud dengan urusan politik adalah menurunnya hubungan Indonesia dan Australia hanya pada urusan pemerintahan. Seperti contoh saat masalah penyardapan terjadi beberapa perwira tinggi kedua negara masih saling berkomunikasi satu sama lain meskipun kegiatan latihan bersama dan patroli koordinasi diberhentikan karena kebijakan politik”.

Dampak masalah pascakasus penyadapan memang tidak begitu besar bagi hubungan diplomasi pertahanan TNI dengan militer Australia. Akan tetapi masalah yang muncul hanya berupa penundaan sementara aktifitas bersama. Sehingga setelah kasus tersebut dianggap selesai maka diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Australia kembali berjalan seperti semula.

TNI dan militer Australia memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik tersebut sudah terbentuk sejak berdirinya Negara Indonesia. Hal ini dapat terlihat saat angkatan udara Australia berhasil menghalau serangan Jepang di Pasifik sehingga batal menyerang Surabaya (*Poesponegoro & Djoened M, 2010*). Kemudian bantuan Angkatan Udara Australia dalam membawa misi untuk Indonesia yang membawa 2 pilot Indonesia yakni Adi Sumarmo dan Adi Sucipto yang pada akhirnya jatuh di Yogyakarta (*Raditya, 2017*). Hubungan baik antara militer Australia dan Indonesia terus berjalan meskipun didalam goncangan politik kedua Negara.

Diplomasi pertahanan Indonesia dan Australia pascakasus penyadapan tahun 2013 adalah berupa beberapa bentuk kerja sama seperti kerja sama antar instansi pertahanan dalam kerangka 2+2 Meeting antar Kementerian Pertahanan Indonesia dengan DOD Australia dan TNI dengan angkatan bersenjata Australia yang meliputi tiga matra yakni darat, laut, dan udara. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh staf puskersin Mabes TNI yang mengatakan bahwa kembalinya diplomasi pertahanan tersebut menandakan kembalinya hubungan baik antara Indonesia dan Australia (wawancara 14 Desember 2017).

Diplomasi pertahanan merupakan alat penting dalam membina hubungan baik dengan Australia sebagai negara yang bertetangga dan memiliki kepentingan strategis lainnya. Indonesia dan Australia saling memandang bahwa hubungan baik militer kedua negara menjadi kunci keberhasilan keamanan dikawasan dari berbagai ancaman seperti masalah terorisme dan kejahatan internasional lainnya. Australia memandang bahwa kekalahan *Islamic States of Iraq Syria* (ISIS) di timur

tengah akan membawa pejuang ISIS kembali ke negara asal mereka termasuk ke Australia. Sehingga diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Australia menjadi kerja sama yang sangat penting dalam menangkal setiap ancaman yang mengancam dikawasan.

4.2.2.1 Diplomasi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI dengan Department of Defence (DoD) Australia

Kementerian pertahanan Republik Indonesia dan *Department of Defence* (DOD) Australia telah mempunyai beberapa bentuk kerja sama yang sudah berjalan bertahun-tahun. Hal ini diungkapkan oleh Kolonel Doli Hutabarat dalam wawancara langsung tanggal 29 September 2017 yang mengatakan bahwa diplomasi pertahanan antara kementerian pertahanan dengan DOD Australia adalah didalam wadah kerjasama *Indonesia-Australia Defence Strategic Dialogue* (IADSD).

Keterangan senada juga diungkapkan oleh Letkol Sianturi yang mendefinisikan IADSD sebagai diplomasi pertahanan antar menteri pertahanan Indonesia-Australia dalam kerangka 2 + 2 meeting yang membahas urusan pertahanan kedua negara.

Kolonel Doli Hutabarat juga menerangkan bahwa diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh kementerian pertahanan dengan Australia masih tetap berjalan meskipun banyak sekali masalah yang dihadapi oleh kedua negara beberapa tahun ini (wawancara 29 September 2017).

IADSD merupakan salah satu bentuk diplomasi pertahanan yang dimiliki Indonesia dengan Australia. Sehingga dalam forum ini dapat dijadikan alat untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara karena di dalam IADSD terdapat banyak agenda yang dibicarakan didalamnya termasuk dalam tataran militer maupun kebijakannya.

Terdapat banyak poin yang disepakati didalam forum IADSD diantaranya masalah modernisasi militer dan industri pertahanan, rencana dan kebijakan strategis, serta perjanjian dan koordinasi antar kementerian pertahanan.

Dalam pembahasan urusan modernisasi dan industri pertahanan Indonesia melakukan pembelian pesawat C-130 dimana Indonesia telah menerima tiga pesawat tepat waktu sesuai jadwal (tail number A-133D, A-1331, dan A-1332). Satu pesawat mengalami penundaan dikarenakan banyaknya karat pada ruangan sayap tengah. Disamping itu juga membahas kerja sama sains dan teknologi untuk melakukan pembentukan forum *research and development* (R and D) bersama seperti yang sudah dimiliki oleh Australia yang dipimpin oleh Mr. Anderson. Poin lain yang dibahas dalam urusan ini adalah *Indo Defence and Expo 2016*. Dalam acara ini Australia bersedia mengirimkan delegasinya untuk hadir dalam mensukseskan acara tersebut dengan menyumbang pembicara dalam seminar dan 26 perusahaan Australia.

Tabel 4.3 Bentuk Diplomasi Pertahanan Kemhan dengan DOD Australia dalam kerangka IADSD

Poin	Catatan	Area	Jangka Waktu	Tanggung jawab
C-130 Program	<ol style="list-style-type: none"> Meminta perbantuan dari Australia terhadap ruang hangar untuk A-1333 hingga maret atau april 2017 Meminta Australia untuk mendorong NGIDS agar menyelesaikan pembaharuan kembali A-1333 Australia meminta perwakilannya untuk mengunjungi simulator C-130 di Lanud Halim Kabaranahan mengunjungi Australia untuk transfer dan menawarkan dalam rangka mengatur kunjungan balasan 	Australia	<p>Maret-April 2017</p> <p>Oktober-November 2016</p>	<p>RAAF</p> <p>Kedutaab Besar Australia di Jakarta</p>
Kerja sama R & D	<ol style="list-style-type: none"> Indonesia akan memfasilitasi dfrat MoU dengan Australia tentang kerja sama riset dan teknologi. Dan Australia juga melakukan hal yang sama Australia meminta diadakan pertemuan antara Brendan Anderson, Konselor regional untuk DSTG di Tokyo, dengan Kabalitbang Kemhan pada Oktober 2016 yang terlebih dahulu mengunjungo 	<p>Australia-Indonesia</p> <p>Australia-Indonesia</p>	<p>September-Oktober 2016</p>	<p>Ditjen pothan DSTG</p> <p>AFA Kabalitbang</p>

	<p>kepala ilmu DSTG</p> <p>3. Australia meminta kepala ilmu DSTG agar memiliki partner dalam kunjungannya pada November 2016</p> <p>4. Australia mengundang Kabalitbang to visit DSTG dan tempat penting lainnya di awal tahun 2017</p> <p>5. Kerja sama forum R&D dalam kuartar 3 tahun 2017</p>	Australia-Indonesia	Oktober-November 2016	AFA Kabalitbang
Indo defence dan Expo	<p>1. Australia memfasilitasi <i>Small Medium Enterprise</i> (SME) kepada Indonesia untuk melaksanakan seminar di tahun 2017 (dilaksanakan setiap dua tahun sekali sebagai bentuk pertukaran dengan Indo Defence Expo yang dilaksanakan di tahun berikutnya bersama SME). Diskusi pada kebijakan <i>Global supply chain</i> sebagai topic utamanya</p> <p>2. Meminta instruktur dari TNI dalam program manajemen kapabilitas teknologi selama 2018-2019</p> <p>3. Meminta ahli pertahanan untuk meninjau ulang posisinya pada lingkup sains, teknologi dan teknik.</p>	Indonesia	2017	<p>Ditjen Potan Dittekinhan IP DIV Kedubes Australia-Jakarta</p> <p>IP DIV Kedubes Australia-Jakarta</p>

Sumber: Minutes IADSD (2016)

Pada pembahasan urusan rencana dan kebijakan strategis, Kementerian pertahanan dan DoD Australia melakukan review dan evaluasi terhadap kerja sama yang sudah berjalan sebelumnya. Dalam pembahasan tatanan kebijakan, Indonesia mendiskusikan tentang kebijakan pertahanan yang sudah tercantum dalam buku putih pertahanan Indonesia. Pembahasan ini juga mendiskusikan masalah konter terorisme, Peran Angkatan perang Australia dan TNI dalam urusan pemerintahan dan melindungi obyek-obyek vital nasional, dan masalah deradikalisasi

Pembahasan mengenai gambaran strategis. Indonesia dan Australia bertukar pandangan terhadap isu strategis keamanan regional, lingkungan, dan pendekatan kebijakan. Kebebasan navigasi, patroli bersama EEZ, kepentingan Indonesia di Natuna, dan perbatasan wilayah

laut. Kepentingan China di Samudera Hindia serta kesempatan untuk mengembangkan diskusi IORA kedalan level strategis dalam mengarahkan tantangan keamanan maritim, meningkatkan kesadaran dengan negara-negara Afrika dan India. Meningkatkan keamanan kawasan melalui kapal penjaga pantai, kapal ikan, kapal militer dalam mencapai kepentingan nasional. Peran netralitas ASEAN membedakan pandangan terhadap SCS didalam ASEAN dan keefektifitasan DOC/COC. Peran daru aturan-aturan Internasional berdasarkan tatanan dan respon terhadap aturan pengadilan arbitrase Internasional. Memperluas hubungan Indonesia-Australia dengan China dalam hal ekonomi dan keamanan.

Tabel 4.4 Hasil pembahasan IADSD Table Top Exercise (TTX)

Item	Catatan	Area	Waktu	Sumber Daya
Melaksanakan pengukuhan TTX on Relationship resilience di Indonesia	TTX difasilitasi oleh Australia, lembaga pemerintah lainnya juga akan berpartisipasi dalam TTX bersama Departemen pertahanan, menteri pertahanan dan TNI	Direktorat Kebijakan Strategis MoD Kebijakan Strategis DoD	15 Nov 2016	Direktorat Kebijakan Strategis MoD Kebijakan Strategis DoD
Melaksanakan IASPEX dan TTX tahun 2017	Tercatat bahwa IASPEX dan TTX dilaksanakan pada kuartar 2	Direktorat Kebijakan Strategis MoD Kebijakan Strategis DoD	Q2 2017	Direktorat Kebijakan Strategis MoD Kebijakan Strategis DoD

Sumber: Minutes IADSD (2016)

Pembahasan yang terakhir adalah membahas masalah perjanjian dan koordinasi. Aktifitas dan poin yang dibahas sebenarnya tidak banyak karena hanya mendiskusikan masalah protokoler kegiatan IADSD. Penambahan kegiatan seperti *ADMM-Plus Exepert Working Group on Peacekeeping Operation (EWG on PKO)*, *Workshop/seminar*, konferensi, *Middle Planning Conference (MPC)*, *final training exercise*, dan *field training exercise (FTX)*.

4.2.2.2 Diplomasi Pertahanan TNI AD dan Angkatan Darat Australia

TNI AD merupakan salah satu angkatan bersenjata yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagai angkatan bersenjata yang mempunyai tugas pertahanan di wilayah territorial, TNI AD juga mempunyai hubungan baik dengan tentara angkatan darat negara tetangga khususnya yg berbatasan langsung dengan Indonesia seperti Australia. Hal ini diungkapkan oleh Kolonel Mugiyono dalam wawancara langsung di kantor pusat penerangan TNI tanggal 14 Desember 2017.

“.....TNI dan militer Australia memiliki hubungan yang baik, khususnya dalam melaksanakan kerja sama yang saling menguntungkan antar kedua instansi militer, beberapa kerja sama yang saat ini dilakukan meliputi *Joint Intelligence Sub-Committee (JISC)*, *Joint Operations and Exercises Sub-Committee (JOESC)*, *Joint Education and Training Sub-Committee (JETSC)* dan *Joint Logistic Sub-Committee (JLSC)* serta pertemuan tingkat pimpinan angkatan bersenjata berupa *High Level Committee (HLC) Meeting*”.

Berdasarkan prinsip politik bebas aktif, TNI AD mempunyai inisiatif untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara sahabat. Dalam menjalankan fungsi Diplomasi pertahanannya, TNI AD dibawah wewenang markas besar angkatan darat (MABESAD) yang jalankan oleh asisten operasi (Asops) kepala staf angkatan darat (KASAD).

Hubungan TNI AD dan angkatan darat Australia sudah terjalin dengan baik sejak lama sehingga memiliki nilai historis. Hubungan baik tersebut sering terganggu akibat naik turunnya hubungan kedua Negara.

Kasus penyadapan yang melibatkan presiden Indonesia saat itu SBY membuat terputusnya beberapa kerja sama TNI AD dengan Angkatan darat Australia. Pascakasus penyadapan yang terjadi pada tahun 2013, TNI AD mendapatkan petunjuk dari pimpinan untuk

meneruskan hubungan bilateral dengan angkatan darat Australia (*Gede*, Komunikasi langsung, 26 Desember 2017).

Australia merupakan salah satu bagian negara tetangga Indonesia yang dipandang memiliki nilai strategis dan mempunyai potensi kerja sama bilateral yang cukup besar. Dalam hal ini, TNI AD melihat manfaat yang didapatkan dari menjalin hubungan bilateral dengan angkatan darat Australia cukup besar kepada Indonesia termasuk terhadap Australia sendiri. Australia juga memandang Indonesia sebagai negara partner yang penting karena mempunyai lokasi yang strategis.

Diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Australia kembali berjalan pascakasus penyadapan dianggap selesai. Bentuk diplomasi pertahanan TNI AD dengan angkatan darat Australia adalah berupa forum bilateral resmi yang disebut dengan *army to army staff talks*, yakni forum dimana kedua pimpinan atau perwakilan masing-masing angkatan darat bertemu dan membicarakan potensi pelaksanaan kerja sama antara kedua angkatan darat.

Adapun bentuk kerja sama TNI AD dan Angkatan darat Australia adalah sebagai berikut:

1. Latihan Bersama (Latma).

Tabel 4.5 Latihan Bersama TNI AD dan Angkatan Darat Australia

Latihan Bersama	Pelaksana	Waktu dan Tempat
Latma <i>Dawn Kookaburra</i> 2016	Kopassus dengan <i>Australian Special Air Service Regiment (SASR)</i>	Tanggal 3 s.d 16 April 2016 di Perth, Australia
Latma <i>Dawn Komodo</i> 2016	Kopassus dengan <i>Australian Special Air Service Regiment (SASR)</i>	Tanggal 18 s.d 29 Juli 2016 di Pusdiklatpassus Kopassus Batujajar
Latma Rhino Ausindo	TNI AD dengan AD Australia	Tanggal 29 Agustus s.d 9 September 2016 di Jakarta.

Latma Wirra Jaya Ausindo stralia	Yonif Mekanis 203/Arya Kamuning dengan 5 th Battalion, The Royal Australian Regiment (5RAR)	11 s.d 24 September 2016 di Darwin, Australia.
----------------------------------	--	--

Sumber: Minutes Army to Army Talk (2016)

2. Senior Officer Visit

Kerja sama ini merupakan kunjungan dari perwira tinggi tiap-tiap angkatan darat ke negara masing-masing. Adapun kunjungan yang pernah dilakukan antara lain:

Tabel 4.6 Senior Officer Visit

Kunjungan	Waktu dan Tempat	Tujuan
Kunjungan Comd 1 Div AD Australia	2 s.d. 4 Maret 2016 di Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD Ciptat, Jawa Barat	meninjau pelatihan <i>Junior Officer Combat Instructor Training Indonesia (JOCIT-I)</i>
Kunjungan Pangdam Jaya ke Australia	20 s.d 24 September 2016 di Darwin Australia.	meninjau Latma Wirra Jaya Ausindo

Sumber: Minutes Army to Army Talk (2016)

3. Personnel Exchange Program (PEP)

Kerja sama ini merupakan program pertukaran prajurit angkatan darat Indonesia dengan prajurit angkatan darat Australia. bentuknya dapat berupa studi banding, diskusi, atau subject matter expert exchange, bisa juga berupa On the job training. Adapun kegiatannya dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.7 Personnel Exchange Program

Program	Waktu dan Tempat
Pengiriman Guru Bahasa Indonesia	3 s.d 28 Oktober 2016 di Socomd Pert, Australia
Kartikaburra Training antara TNI AD dengan Australia	16 s.d 29 Oktober 2016 di Australia
Kartikaburra Training antara TNI AD dengan Australia	6 s.d 19 November 2016 di Indonesia

Sumber: Minutes Army to Army Talk (2016)

Selain program diatas (Lihat Tabel 4.7), TNI dan Angkatan darat Australia juga memiliki program pertukaran perwira lainnya dalam kegiatan berikut:

- a) Program Pertukaran Personel *Griffin Exchange Program* dengan fokus kegiatan pada kemampuan Jihandak dan anjing pelacak.
 - *Griffin Kookaburra Exchange Program* yaitu program pertukaran 5 orang personel Kopassus ke *Australian Special Operation Comammad (SOCOMD) Special Operation Engineer Regiment (SOER)* pada tanggal 3 s.d 16 April 2016 di Sydney, Australia
 - *Griffin Komodo Exchange Program* yaitu program pertukaran 5 orang personel *SOCAUST Special Operation Engineer Regiment (SOER)* ke Kopassus dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 28 Juli 2016 Markas Sat-81/Gultor Kopassus, Jakarta
- b) *Pegasus Exchange Program* dengan fokus pada kemampuan terjun statis dan terjun bebas militer (TBM).
- c) *Pegassus Kookaburra* yaitu program pertukaran 5 orang personel Kopassus ke *Parachute Training School (PTS) Australian Army* dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 9 April 2016 di Australia
- d) *Pegassus Komodo* yaitu program pertukaran 5 orang personel *Parachute Training School (PTS) Australian Army* ke Kopassus dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 22 Juli 2016 di Pusdiklatpassus.

4. Pertukaran pendidikan,

Kerjasama pertukaran pendidikan antara TNI AD dan angkatan darat Australia saling bertukar siswa, TNI AD mengirimkan personil untuk belajar di Australia, begitu juga dengan Australia mengirimkan personilnya untuk belajar di Indonesia pada mata pendidikan tertentu. Adapun kegiatan yang sudah pernah berjalan antara lain sebagai berikut ini:

Tabel 4.8 Pertukaran pendidikan TNI AD dengan Angkatan Darat Australia

Program	Waktu dan Tempat
Pelatihan <i>Junior Officer Combat Instructor Training Indonesia</i> (JOCIT-I)	29 Februari s.d. 11 Maret 2016 di Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD Cipatat, Jawa Barat
<i>Joint Officer Combat Instructor Training</i> (JOCIT)-A	24 Agustus s.d 2 September 2016 di Tully, Australia.

Sumber: Minutes Army to Army Talk (2016)

Menjaga hubungan baik dengan Australia merupakan bentuk pertahanan dari ancaman yang membahayakan Indonesia. Kerjasama mampu membentuk tembok pertahanan dari unsur luar yang mampu bereskalasi kedalam konflik seperti konflik di Laut China Selatan, konflik marawi, ISIS, terorisme, dan sebagainya. Tindakan terbaik yang dilakukan oleh TNI AD adalah dengan upaya pencegahan berupa pembinaan hubungan baik dengan negara-negara tetangga terutama Australia (.Gede, Komunikasi langsung, 26 Desember 2017). Kerjasama dengan Australia menguntungkan Indonesia seperti *Information and Intelligent Sharing*. Sedangkan bagi Australia, Indonesia dipandang sebagai negara yang kuat, subur, strategis, dan menjadi partner penting di dalam kawasan Asia.

4.2.2.3 Kerja sama TNI AL dan Royal Australian Navy (RAN)

Seperti halnya dengan Instansi militer lainnya, kerja sama TNI AL dan RAN juga mengalami penghentian saat memanasnya hubungan Indonesia-Australia saat kasus penyadapan. Penghentian tersebut tidak semua menghentikan semua kerja sama yang telah disepakati antara TNI AL-RAN, hanya pada sebatas pada beberapa latihan dan operasi seperti latihan bersama dan patroli terkoordinasi (*Hafiz*, Komunikasi langsung, 16 Oktober 2017). Penerbitan telegram panglima TNI Nomor STR/347/2014 tanggal 23 September 2014, hubungan diplomasi pertahanan antara RI-Australia berangsur-angsur pulih terutama bidang intelijen, operasi dan latihan. Hal tersebut diawali dengan pelaksanaan NTNT ke-7 pada September 2014 lalu di Canberra. Beberapa kegiatan kerja sama akan dilaksanakan kembali seperti Latma New Horizon, Cassowary, dan Patkor Ausindo di tahun-tahun selanjutnya.

TNI AL-RAN sudah memiliki nota kesepahaman kerja sama *Terms of Reference for Naval Strategy Talks between Royal Australian Navy and Republic Of Indonesia Navy* yang sudah ditandatangani bersama pada tanggal 04 November 2009. Menurut Letkol Laut Rasyid Al Hafiz *Navy to Navy Talks* adalah kerja sama bilateral antara dua negara yang dilakukan oleh masing-masing angkatan laut untuk melaksanakan pembicaraan-pembicaraan, diskusi, *information sharing* mengenai isu-isu strategis dibidang maritim meliputi operasi, latihan, pendidikan, termasuk pelatihan, kursus, kemudian kegiatan-kegiatan pertukaran tentaranya baik dilevel taruna maupun di level perwira. Navy to Navy Talks merupakan wadah atau forum dimana masing-masing angkatan laut dua negara untuk menindaklanjuti kerja sama yang telah diputuskan bersama sebelumnya dan merencanakan kegiatan bersama yang akan dilakukan (*Hafiz*, Komunikasi langsung, 16 Oktober 2017).

Navy to Navy Talks yang sudah berjalan merupakan embrio dari kerja sama angkatan bersenjata kedua negara namun ada juga *Navy to Navy Talks* yang merupakan turunan dari kerja sama kedua angkatan bersenjata negara tersebut. Disamping itu, Ada juga *Navy to Navy Talks* angkatan laut yang menginisiasinya sebelum adanya inisiasi dari angkatan bersenjata secara keseluruhan dalam hal ini TNI, dan Ada juga kerja sama *Navy to Navy Talks* yang sudah dilakukan oleh angkatan bersenjata kemudian dilanjutkan oleh angkatan laut. Saat ini TNI AL sudah melakukan *Navy to Navy Talks* dengan 15 negara dan tahun depan akan dilakukan dengan Rusia sehingga jadi 16 negara fokus *Navy to Navy Talks*. Adapun forum kerja sama *Navy to Navy Talks* antara TNI AL dengan RAN yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) NTNT -1, Jakarta 9 s.d. 12 Maret 2004
- 2) NTNT -2, Canberra 22 s.d. 26 Agustus 2005
- 3) NTNT -3, Canberra 03 s.d. 06 November 2009
- 4) NTNT -4, Bali 18 s.d. 19 Juli 2011
- 5) NTNT -5, Sydney 16 s.d. 20 Juli 2012
- 6) NTNT -6, Jakarta 23 s.d. 26 Juni 2013
- 7) NTNT -7, Canberra 20 s.d. 24 Sept 2014

Kegiatan kerja sama bilateral dibidang pertahanan yang sudah berjalan antara lain berupa operasi, latihan, pendidikan, pelatihan, dan kursus. Tidak hanya kerja sama bilateral yang dilakukan, kerja sama TNI AL dan RAN juga dalam lingkup kerja sama multilateral seperti *Western Pacific Naval Symposium*, *Indian Ocean Naval Symposium*, dan *Indian Ocean Rim Association*. Adapun kegiatan kerja sama antara TNI AL dan RAN akan dijabarkan dibawah ini:

1. Giat Operasi.

Tabel 4.9 Giat Operasi TNI AL-RAN

Kegiatan	Waktu	Pelaksanaan	Tanggal	Armada
The Indonesian/Australian Coordinate Patrol	1 Tahun sekali	1. Patkor Ausindo 01/2010	10 April- 09 Mei 2010	KRI WIR, KRI HBS, dan U-622
		2. Patkor Ausindo 02/2011	01 April – 30 April 2011	KRI SNU, KRI SRA, dan U-622
		3. Patkor Ausindo 03/2012	31 Maret – 29 April 2012	KRI KKP, KRI TKL, dan U-616
		4. Patkor Ausindo 04/2013	02 Sept – 29 Sept 2013	KRI HIU, KRI KKP, dan P-851
Sydney International Fleet Review			02 s.d 11 Oktober 2013	KRI SIM-367, dan KRI DWR

Sumber: Minutes Navy to Navy Talks (2015)

2. Giat Latihan

Giat latihan merupakan kegiatan latihan bersama antara TNI AL dan RAN. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Giat Latihan TNI AL-RAN

No	Latihan	Waktu	Tempat	Ket.
1	<i>IPC Exercise New Horison 2014</i>	1 s.d. 6 September 2013	Surabaya	6 Personel TNI AL
2	<i>Mid Planning Conference (MPC) Ex Kakadu 2014</i>	2 s.d. 3 April 2014	Australia	dihadiri Athal RI sebagai observer
3	<i>Final Planning Conference (FPC) Kakadu 2014</i>	23 s.d. 24 Juni 2014	Darwin	dihadiri Athal RI sebagai observer
4	<i>Cassowary Exercise 2015</i>	2014	Indonesia	1 PKR dan 1 Heli BO, TBD
5	<i>IPC Exercise Cassowary 2015</i>			4 personel TNI AL

Sumber: Minutes Navy to Navy Talks (2015)

3. Giat Pendidikan, Pelatihan, dan Kursus

Adapun kegiatan kerja sama antara TNI AL dan RAN dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan kursus antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.11 Giat Pendidikan, Pelatihan, dan Kursus TNI AL-RAN

No	Kegiatan	No	Kegiatan
1	Defence Strategic Studies Course (DSSC) / Setara Lemhanas	17	Methodology English Language Course (MELT)
2	Australian Command and Staff Course / Setara Seskoal	18	Law of Peace Operation Course
3	01/13 English teaching development course (ETDC)	19	Overseas Joint Warfare Course (OJWC)
4	01/13 Advanced Australian English Language Course (AAELC)	20	Overseas Joint Logistic Course (OJLC)
5	Maritime Operation Law Course (MOLC)	21	WO and NCO Leadership Forum Course
6	Visiting fellow position the seapower center	22	United Nations Military Observers Course (UNMOC)
7	Maritime Security Cooperation Course (MSCC)	23	Governance & Financial MGNT Seminar (GOVIN)
8	Command and Staff Operation Law	24	Post Graduate (S-2)
9	Australian Command and Staff Course (ACSC) / setingkat Seskoal	25	Capability and Technology Management Program (CTMP)
10	The Collin East Award	26	Health Aspect of Disasters Course
11	Teaching Pronunciation Course (TPC)	27	Intermediate Navigation Course (INTNAV)
12	Pressurised Submarine Escape Training Course (PSET)	28	Small Ship Navigation Course (SSNC)
13	H-2 Hydrographic Surveying (Setingkat Diklapa)	29	DCP Training Technology Suite
14	Governance and Financial Management Course	30	Aviation Safety Officer Course (ASO Course)
15	Rules of Engagement Workshop (ROEW)	31	Communicable Disease Control Course
16	Emergency Management Seminar (EMS)		

Sumber: Minutes Navy to Navy Talks (2015)

4. Giat Kunjungan

Giat kunjungan merupakan bentuk diplomasi pertahanan dan merupakan agenda dari *Navy to Navy Talks* itu sendiri. Adapun kunjungan yang pernah dilakukan antara Indonesia dan Australia adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12 Giat Kunjungan TNI AL-RAN

No	Kunjungan Indonesia	No	Kunjungan Australia
1	Memenuhi Undangan <i>Commander Australian Fleet (COMAUSFLT)</i> Tanggal 2-8 Februari 2013	1	Kunjungan Kehormatan Kepada KASAL, 8 April 2013
2	Mengunjungi Australian Hydrographic Service Facilities tanggal 10 s.d 16 Februari 2013	2	Kunjungan Kehormatan kepada Pangarmabar dan Waasop Kasal, 23 April 2013
3	Kunjungan Kehormatan 11 s.d 12 Agustus 2013	3	Kunjungan Kehormatan Kepada Asops Kasal, 27 Mei 2013
4	Mewakili KASAL Menghadiri IFR 2013 13 s.d 6 Oktober 2013	4	Kunjungan Kehormatan dalam rangka memenuhi undangan KASAL, 13 s.d 14 Juni 2013
5	Mewakili KASAL menghadiri Sea Power Conference (SPC) tanggal 5 s.d 8 Oktober 2013	5	Kunjungan kehormatan KASAL dan Pangarmabar, 25 Juni 2013
6	Mewakili KASAL menghadiri IONS <i>Conclave of Chief</i> Tanggal 25 s.d 28 Maret 2014	6	Kunjungan kehormatan Waasops, 1 Nov 2013
7	Mewakili KASAL Menjadi Pembicara dalam 2 nd Trilateral Dialogue on Indian Ocean di Canberra, 9 s.d 10 September 2014	7	Menghadiri closing ceremony Exercise New Horizon 2013 di Surabaya, 29 Nov 2013
8	Mengikuti Kegiatan Rule of Engagement Workshop (ROEW) di Sydney, Australia	8	Kunjungan kehormatan kepada Kasal, 16 Februari 2014
9	Mengikuti NTNT ke-7 di Canberra, 24 September 2014	9	Kunjungan Kehormatan kepada Dandanjaka, 13 Agustus 2014

Sumber: Minutes Navy to Navy Talks (2015)

5. Kerja sama Multilateral TNI AL-RAN

1) WPNS (*Western Pacific Naval Symposium*)

WPNS merupakan forum kerja sama antar angkatan laut di kawasan pasifik barat yang didirikan sejak tahun 1987, dengan anggota sampai saat ini adalah 22 negara anggota tetap dan 3 negara *Observer*. WPNS bertujuan untuk mendiskusikan dan membahas masalah-masalah kemaritiman di kawasan regional, serta

kemungkinan kerja sama antar negara WPNS. WPNS terakhir dilaksanakan di Qingdao, China pada tanggal 21 s.d 25 April 2014 dimana salah satu hasil kesepakatannya adalah disetujuinya CUES (Code Unplanned Encounters at Sea) yang telah dijadikan salah satu buku referensi bagi angkatan laut negara anggota WPNS, dalam hal ini TNI AL telah mendistribusikan dan mensosialisasikan CUES tersebut.

2) IONS (*Indian Ocean Naval Symposium*)

IONS merupakan forum kerja sama antar angkatan laut kawasan samudera hindia di bidang keamanan maritime. Forum ini dimaksudkan sebagai salah satu alat dalam menjamin dan mendapatkan keuntungan bersama dalam bidang stabilitas, keamanan, keselamatan maritim dan kemakmuran diantara *Littoral States* di *Indian Ocean Region*. Dalam pelaksanaan IONS *Conclave of Chief* yang terakhir di Australia pada tanggal 25 s.d 28 Maret 2014, TNI AL diwakili oleh Laksda Agung Pramono, S.H., M.Hum., Pangarmatim, Laksma TNI Aan Kurnia S.Sos., Danguspurlatim dan Athal RI Kolonel Didik Kurniawan. Dari pelaksanaan *Conclave of Chief* tersebut dihasilkan beberapa kesepakatan untuk kegiatan kedepan antara lain:

- a) *Prepatory Workshop 2015* di Pakistan
- b) *Chairman of IONS 2016-2018* adalah Pakistan
- c) *Prepatory Workshop 2017* di Afsel, dan
- d) *Chairman of IONS 2018-2020* adalah Iran

3) IORA (*Indian Ocean Rim Association*)

IORA merupakan forum trilateral yang beranggotakan Indonesia, Australia, dan India, dengan Indonesia sebagai ketua periode 2015-2017. Pada periode sebelumnya Australia menyelenggarakan *Trilateral Dialogue IORA* di Canberra dimana TNI AL mengutus Kasarmabar, Laksma TNI A. Octavian pada tanggal 9 s.d 10 September 2014.

4.3 Pembahasan

Pisau analisis yang digunakan untuk menjawab faktor yang mempengaruhi naik-turunnya hubungan Indonesia Australia adalah menggunakan teori realisme, konstruktifisme, dan komunikasi internasional. Teori-teori tersebut cocok dipakai untuk menganalisa fenomena hubungan antara Indonesia dan Australia saat ini. Lebih jauh lagi, teori tersebut juga digunakan untuk melihat interaksi dan respon kedua negara menghasilkan sebuah kebijakan yang mempengaruhi masing-masing Negara.

4.3.1 Faktor yang mempengaruhi naik-turunnya hubungan Indonesia-Australia Pascakrus penyesuaian tahun 2013

Hubungan Indonesia dan Australia penuh diwarnai banyak dinamika pascakrus penyesuaian tahun 2013. Pembahasannya akan dijabarkan dibawah ini.

4.3.1.1 Faktor Geografis

Faktor penting yang mempengaruhi naik dan turunnya hubungan Indonesia dan Australia tidak lepas dari posisi kedua negara sebagai negara yang bertetangga sehingga Indonesia dan Australia banyak sekali mengalami interaksi yang menimbulkan banyak gesekan. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor geografis Indonesia dan Australia menyebabkan hubungan kedua negara selalu mengalami naik dan turun.

Teori realisme memberi bantuan dalam melakukan analisis terhadap pengaruh kondisi geografis terhadap hubungan antar negara. Faktanya bahwa Indonesia dan Australia merupakan negara yang berbatasan langsung yang dipisahkan oleh laut. Kondisi tersebut menentukan interaksi antara Indonesia dan Australia untuk memutuskan apakah menjadi musuh atau kawan.

Menurut Hans Morgenthau (1972), faktor yang paling stabil terhadap kekuatan suatu negara tergantung pada kondisi geografis. Melihat kondisi Indonesia dan Australia secara geografis merupakan negara yang saling bertetangga. Interaksi kedua negara ini tidak dapat

dipisahkan satu sama lain. Sehingga faktor geografis menentukan Australia secara elemen permanen untuk membangun hubungan kerja sama dengan Indonesia.

Faktor geografis Indonesia dan Australia berdampak pada banyak kegiatan yang menyangkut kedua negara. Hal ini terlihat pada hubungan Indonesia dan Australia sejak awal-awal masa kemerdekaan Republik Indonesia. Australia secara langsung memberikan dukungan untuk kemerdekaan Indonesia. Kepercayaan Indonesia semakin tinggi setelah menunjuk Australia sebagai negara partner dalam menyelesaikan permasalahan dengan Belanda.

Gambar 4.1 Peta Indonesia-Australia



Sumber: Google Maps (2018)

Kondisi geografis Indonesia memang tidak mampu dipungkiri menyebabkan hubungan Indonesia Australia mengalami naik dan turun. Hal ini disebabkan oleh banyak aktifitas dari kedua Negara yang sering mengalami gesekan dalam semua bidang.

Indonesia dan Australia adalah negara yang bertetangga. Indonesia memiliki hubungan yang begitu erat dengan Australia. Hubungan bilateral Indonesia dengan Australia merupakan hubungan bilateral yang sangat unik, dimana hubungan kedua negara saling mengalami naik dan turun, padahal letak geografis kedua negara tidaklah begitu jauh dan saling membutuhkan satu sama lain. Naik dan turunnya hubungan Indonesia-Australia ini merupakan sebuah bentuk hal yang wajar sebagai negara yang bertetangga dengan Indonesia. Penyelesaian yang dilakukan dengan cepat dan jelas akan membawa kembali hubungan baik kedua negara. Hal yang menjadi sebuah keniscayaan bahwa di dalam hubungan bilateral antara dua negara harus meletakkan sikap saling menghargai, menghormati, dan menjunjung tinggi kedaulatan masing-masing negara sebagai dasar dalam bersahabat.

4.3.1.2 Komunikasi Politik Pemimpin

Faktor penting lainnya adalah komunikasi antar pemimpin negara yang memberikan kontribusi besar dalam pengaruh naik dan turunnya hubungan Indonesia dan Australia pascakasus penyadapan. Bentuk komunikasi politik pemimpin mampu mempengaruhi kebijakan politik negara dan menentukan tindakan negara terhadap negara lain.

Teori konstruktifisme menurut *wendth* (1992), hubungan antar negara terkonstruksi dari identitas dan kepentingan para aktor. Seperti yang terlihat pada hubungan Indonesia dan Australia, aktor-aktor penting seperti pemimpin negara dan aktor politik negara mempengaruhi kebijakan negara yang diambil ditengah naik-turunnya hubungan Indonesia dan Australia. Pemimpin negara disini adalah presiden Indonesia Jokowi dan Perdana Menteri Australia Turnbull yang disaat pascakasus penyadapan antara tahun 2014 hingga 2017 menjadi pemimpin tertinggi negara. Tindakan kedua aktor politik ini sangat menentukan aksi dalam menyelesaikan masalah kedua negara yang sering terjadi. Kedua pemimpin itu terlihat sangat mementingkan kepentingan negara diatas permasalahan yang mereka hadapi.

Masalah memang menjadi penghambat lancarnya hubungan Indonesia dan Australia yang berdampak pada terputusnya beberapa kerja sama yang sudah terjalin lama. Kedua aktor ini memahami betul posisi masing-masing karena Indonesia dan Australia tidak dapat dipisahkan apalagi dalam masalah yang berkepanjangan.

Teori konstruktivisme menurut *Guzzini dan Leander (2005)* juga mampu melihat hubungan negara itu dikendalikan oleh ide-ide, norma-norma, konsepsi-konsepsi, asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang secara luas dimiliki secara bersama-sama oleh para actor. Para aktor pemimpin negara baik Indonesia dan Australia sama-sama memiliki asumsi bahwa hubungan Indonesia dan Australia tidak dapat dipisahkan. Pertimbangan masalah lain seperti kerja sama ekonomi, perdagangan, pariwisata, dan lain sebagainya menurut mereka dianggap lebih penting dari pada mempermasalahkan masalah yang menimpa kedua negara. Pemimpin negara baik Jokowi dan Turnbull memiliki karakter yang lebih lembut dan lebih mampu melihat kondisi yang ada. Masalah yang ada memang perlu diselesaikan secepatnya sehingga kerja sama yang sudah ada dapat kembali berjalan dengan lancar.

Menurut *Jackson (2007)* mengatakan bahwa teori konstruktivisme juga melihat hubungan internasional itu bersifat relatif dan hasil bentukan bersama. Dalam hubungan yang terbentuk antara Indonesia dan Australia juga begitu relatif berdasarkan kemauan bersama atas pertimbangan kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan nasional menjadi tonggak utama bertahannya hubungan Indonesia dan Australia. Menyadari kondisi tersebut para pemimpin negara dan birokrat terus mempertahankan hubungan baik kedua negara.

Dari ketiga pakar konstruktifis tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh komunikasi politik pemimpin negara dalam mempertimbangkan kepentingan nasional mampu mempengaruhi kebijakan negara yang berdampak pada penyelesaian masalah yang terjadi antara kedua negara.

Disisi lain, Komunikasi politik pemimpin Indonesia dan Australia dilihat dari kaca mata teori komunikasi internasional menunjukkan bahwa masing-masing pemimpin negara saling melakukan komunikasi dalam melakukan hubungan kerja sama.

Teori komunikasi internasional menurut *Wilbur* (1954) mengatakan bahwa komunikasi internasional adalah komunikasi politik yang dilaksanakan oleh negara dan dimasukkan kedalam bentuk kegiatan propaganda, informasi, diplomasi, dan pertahanan keamanan suatu negara. Melihat komunikasi pemimpin politik Indonesia dan Australia sangat jelas bahwa kedua pemimpin negara cenderung lebih ingin menyelesaikan masalah dengan cepat dan secepat mungkin memulihkan hubungan kerja sama yang sudah terjalin. Seperti pada kasus pelecehan lambang negara. Pemerintah Indonesia melalui instruksi presiden Jokowi memerintahkan instansi terkait seperti kementerian hukum, kemhan, dan mabas TNI untuk segera melakukan penyelidikan dan segera menyelesaikan masalah tersebut. Presiden menginginkan agar masalah tidak berlarut lama dan menjadi masalah yang merugikan Indonesia. Begitu juga dengan respon Perdana Menteri Australia yang dengan senang hati dan terbuka agar instansi yang bermasalah tersebut untuk saling menyelesaikan masalahnya dengan cepat. Hasil yang dicapai adalah masalah cepat terselesaikan dan berdampak pada kembalinya kerja sama Indonesia-Australia kembali pulih seperti sekian lama.

Merujuk pada penelitian sebelumnya, komunikasi strategis yang dilakukan adalah melalui koordinasi proses pada level pemimpin negara. Implementasinya melalui menteri Luar negeri sebagai *sector vocal* G to G. dalam hal ini komunikasi melalui kerja sama bilateral antar kedua negara.

Selama ini hubungan antara Indonesia dengan Australia selalu mengalami pasang surut atau *up and down*. Menurut Riaz Saehu kepala sub Direktorat Asia Timur dan Pasifik Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dalam wawancara di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, hal ini tentunya tergantung dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah / partai yang berkuasa masing-masing negara. Hal ini sejalan

dengan menanggapi masalah yang terjadi pascakasus penyesuaian yang sudah di jelaskan diatas menunjukkan faktor pemimpin sebagai pembuat kebijakan mempengaruhi hubungan suatu negara.

Kemenangan partai liberal Australia pada pemilu 7 September 2013 menimbulkan harapan baru bagi hubungan baik Australia dan Indonesia dengan bergantinya pemimpin baru. Sedangkan di Indonesia sendiri juga mengalami pergantian pemimpin yang sangat merubah peta politik nasional. Hubungan kedekatan kedua pemimpin baru ini sangat baik dengan ditandainya kunjungan Perdana Menteri baru Australia ke Presiden Jokowi. Melihat dari permasalahan yang membelit Indonesia dan Australia seperti pada kasus *Illegal Migrant*, kedua pemimpin ini memiliki cara yang lebih lembut dalam menyelesaikan masalah sehingga tidak terlalu membuat hubungan kedua negara kembali memanas. Pada masalah terbaru juga yang terjadi pada akhir tahun 2016 dimana ditemukan pelecehan terhadap lambang Negara Indonesia di Diklat prajurit Australia, Indonesia atas Instruksi presiden Jokowi hanya memerintahkan untuk dilakukan penyelidikan dan setelah Australia melakukan permintaan maaf kepada Indonesia masalah tersebut sudah dianggap selesai.

Pengaruh hubungan kedua pemimpin ini sangat mempengaruhi naik turunnya hubungan Indonesia-Australia. Seperti yang dikatakan oleh Hudson dan Vore (1995) bahwa keputusan suatu negara dipengaruhi pemikiran manusia yang melibatkan pemikiran dan hal-hal yang mempengaruhi mereka secara kompleks. Kesamaan antara presiden Jokowi dan Turnbull ini adalah sama-sama berasal dari seorang yang berlatang belakang sebagai pengusaha. Hal itu memberikan pengaruh terhadap penentuan kebijakan negara. Kedua pemimpin negara tentu akan lebih melihat untung dan ruginya. Begitu pula dengan kondisi hubungan Indonesia-Australia. Mereka melihat bahwa kedua negara ini saling berkontribusi dan membutuhkan satu sama lain.

Komunikasi yang dibangun antara presiden Jokowi dan PM Turnbull lebih mengedepankan untung dan rugi karena mereka sama-sama memiliki latar belakang seorang pengusaha. Kedua pemimpin negara melihat bahwa masalah yang mengganggu ketegangan hubungan kedua negara mampu memberikan dampak buruk terhadap kepentingan domestik kedua negara sehingga ketika Indonesia merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan Australia maka bentuk komunikasi internasional yang dipakai cenderung negatif sedangkan Australia cenderung kearah positif begitu pula sebaliknya. Seperti contoh saat insiden pelecehan terhadap lambang negara Indonesia oleh oknum militer Australia, bentuk komunikasi politiknya adalah dengan memutuskan beberapa kerja sama dengan Australia dan setelah itu Australia meminta maaf dan memberi hukuman tegas kepada oknum militer tersebut maka kasus tersebut sudah dianggap selesai dan kerja sama antara Indonesia dan Australia kembali berjalan.

Disisi lain, kedekatan emosional presiden Jokowi dan PM Turnbull Malcolm sangatlah tinggi. Hal ini dilihat dari kunjungan kedua pemimpin baik ke Indonesia maupun ke Australia. Hal ini tentu berdampak pada pola ketenangan yang mereka lakukan saat terjadi masalah. Presiden Jokowi yang sederhana dan apadanya justru lebih tenang dalam menyikapi masalah dengan Australia, hal ini didukung dengan karakteristik yang sama dengan PM Australia tersebut yang juga lebih tenang dan *calm* sehingga masalah yang dihadapi dengan cepat bisa terselesaikan. Mungkin hal tersebut bisa berbeda pada pemimpin kedua negara yang sebelumnya lebih susah untuk menemukan titik tengah pada permasalahan yang ada.

Berdasarkan analisis teori yang digunakan terhadap komunikasi yang dibangun antara pemimpin Indonesia dan Australia menunjukkan aksi yang menghasilkan beberapa dampak terhadap kebijakan negara ditengah masalah yang dihadapi. Pertama, komunikasi kedua pemimpin negara mampu mempercepat penyelesaian masalah yang terjadi antara Indonesia dan Australia. Kedua, komunikasi yang dibangun menjadi

sebuah kebijakan negara yang mampu meredam masalah sehingga tidak menjadikannya semakin rumit. Ketiga, komunikasi yang ditunjukkan memberikan warna tersendiri sebagai pembeda kekuatan komunikasi politik pemimpin negara sebelumnya.

4.3.1.3 Kepentingan Nasional: Pendekatan Konstruktivisme

Hubungan Indonesia dan Australia pada dasarnya adalah sebuah tujuan utama dalam mencapai kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan faktor penting dalam melakukan kerja sama yang saling menguntungkan. Kepentingan nasional Indonesia sudah termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat yang meliputi empat poin yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut teori konstruktivisme kepentingan nasional sebuah negara adalah proses yang dibangun oleh perspektif-perspektif sosial, ide-ide, norma-norma, konsepsi-konsepsi, asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang dimiliki secara bersama-sama oleh para aktor. Dalam hal ini, kepentingan nasional Indonesia telah dibentuk oleh para aktor politik nasional yang bersama-sama merumuskannya sebelum negara Indonesia merdeka.

Indonesia dan Australia memiliki komposisi struktur sumber daya manusia yang berbeda seperti perbedaan ras, agama, dan perbedaan lainnya. Indonesia merupakan negara dengan jumlah suku yang sangat banyak dan agama yang beragam akan tetapi hal tersebut tidak menjadi penghalang kedua negara untuk melakukan hubungan ataupun kerja sama. Dibalik itu semua terdapat kepentingan nasional masing-masing negara yang mempengaruhinya.

Kerjasama Indonesia dengan Australia sangatlah besar melihat kepentingan nasional Indonesia tersebut. Banyak dari kerjasama dengan Australia telah memenuhi kepentingan Indonesia didalamnya. Analisis kepentingan nasional Indonesia berdasarkan hubungan kerjasama dengan Indonesia sebagai berikut:

Tabel 4.13 Kepentingan nasional Indonesia

No	Kepentingan Nasional	Tujuan Kerja sama dengan Australia
1	Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia	Tidak dapat dipungkiri bahwa diplomasi pertahanan dengan Australia merupakan bentuk upaya Indonesia melakukan hubungan baik dengan Australia agar Australia tidak menjadi sebuah ancaman yang mengancam Indonesia. Dalam bagian sebelumnya sudah dijelaskan banyak tentang diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia dalam rangka membangun <i>Confidence Building Measure</i> (CBM). Dengan menjalin persahabatan dengan Negara tetangga membuat kapasitas kekuatan Indonesia semakin besar. Selama ini Indonesia sangat aktif dalam hal membentuk suatu pertahanan untuk mengamankan wilayah kawasan dengan mengutamakan diplomasi. Disamping itu, diplomasi pertahanan dengan Australia juga mampu memperkuat pertahanan Indonesia dari kemungkinan ancaman Negara lain

2	Memajukan kesejahteraan umum	Kerja sama dengan Australia tidak hanya pada urusan militer saja akan tetapi kerja sama dalam bidang lain seperti perdagangan dan jasa. Kedua Negara saling mendapatkan keuntungan dari kerja sama ekonomi tersebut. Indonesia banyak menerima keuntungan dari kunjungan wisatawan asing dari Australia dan Australia juga mendapatkan banyak keuntungan dari ekspor sapi ke Indonesia dan begitu juga dengan sector lain yang masih banyak lagi
3	Mencerdaskan kehidupan bangsa	Kerja sama pendidikan dengan Australia juga sangat kuat. Banyak warga Negara Indonesia yang mengenyam di Negara kanguru tersebut. Tidak hanya itu, Australia juga memberikan banyak beasiswa kepada masyarakat Indonesia. Australia juga menggelontorkan dana bantuan sebesar 600 juta dollar untuk Indonesia yang dialokasikan untuk pendidikan di Indonesia, infrastruktur pendidikan, dan lain-lain.

Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia juga membutuhkan Australia dalam rangka mencapai kepentingan nasional Indonesia. oleh karena itu setiap masalah yang muncul dengan Australia, kedua negara selalu berusaha untuk segera mencari jalan tengah penyelesaian dan memulihkan masalah tersebut guna mempercepat menggapai kepentingan nasional masing-masing negara.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional Indonesia dan Australia didalamnya memberikan dampak terhadap negara dalam mempertimbangkan hubungan kerja sama yang

sudah berjalan. Kepentingan nasional menjadi sangat penting bagi kedua negara untuk memperjuangkannya. Sehingga kepentingan nasional menjadi faktor penting yang mempengaruhi naik turunnya hubungan Indonesia-Australia. Masing-masing Negara memiliki kepentingan nasional yang harus diperjuangkan sehingga terkadang bertabrakan dengan kepentingan nasional Indonesia yang lainnya tetapi kepentingan nasional yang besar dari kedua negara menjadi penentu berlanjutnya hubungan kerja sama antara Indonesia dan Australia.

Kepentingan nasional dibidang ekonomi dan perdagangan Indonesia-australia, kedua negara memiliki nilai kerjasama yang sangat tinggi (Lihat tabel 4.8).

Tabel 4.14 Neraca Perdagangan Indonesia dengan Australia Periode:
2012-2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Trend(%) 2012-2016	Jan-Nov		Perub.(%) 2017/2016
							2016	2017	
TOTAL PERDAGANGAN	10.203.060,7	9.408.648,6	10.595.876,1	8.518.102,1	8.469.777,1	-4,61	7.691.170,6	7.874.185,9	2,38
MIGAS	1.766.129,1	1.605.897,7	1.408.558,8	851.030,7	1.270.007,8	-12,14	1.117.555,2	1.363.214,4	21,98
NON MIGAS	8.436.931,6	7.802.750,9	9.187.317,3	7.667.071,4	7.199.769,3	-3,29	6.573.615,5	6.510.971,5	-0,95
EKSPOR	4.905.413,1	4.370.482,1	4.948.373,7	3.702.307,6	3.208.918,0	-9,65	3.008.274,5	2.275.807,3	-24,35
MIGAS	1.546.948,1	1.397.221,1	1.251.831,1	707.665,2	538.276,0	-24,36	488.103,2	477.720,1	-2,13
NON MIGAS	3.358.465,0	2.973.261,0	3.696.542,7	2.994.642,3	2.670.642,1	-4,41	2.520.171,3	1.798.087,2	-28,65
IMPOR	5.297.647,6	5.038.166,5	5.647.502,4	4.815.794,5	5.260.859,0	-0,59	4.682.896,1	5.598.378,6	19,55
MIGAS	219.181,0	208.676,6	156.727,7	143.365,4	731.731,8	22,58	629.452,0	885.494,3	40,68
NON MIGAS	5.078.466,7	4.829.489,9	5.490.774,6	4.672.429,1	4.529.127,2	-2,59	4.053.444,1	4.712.884,3	16,27
NERACA PERDAGANGAN	-392.234,6	-667.684,3	-699.128,6	-1.113.487,0	-2.051.941,0	46,53	-1.674.621,6	-3.322.571,3	-98,41
MIGAS	1.327.767,2	1.188.544,5	1.095.103,4	564.299,8	-193.455,8	0,00	-141.348,7	-407.774,3	-188,49
NON MIGAS	-1.720.001,7	-1.856.228,9	-1.794.232,0	-1.677.786,7	-1.858.485,2	0,54	-1.533.272,8	-2.914.797,0	-90,10

Sumber: BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan

Kerja sama luar negeri khususnya dengan Australia, baik bagi Indonesia maupun Australia sama-sama penting. Pertama adalah membangun kapasitas. Kerja sama Indonesia-australia mampu memperkuat kemampuan baik pertahanan negara maupun TNI itu sendiri. Kedua, kerja sama tidak akan bisa dilaksanakan tanpa adanya *mutual trust*. Jadi harus ada mutual trust dari kedua belah pihak karena ketika kerja sama itu berhasil maka mampu membantu meredam gejala-gejala yang terjadi. Ketiga, kepentingan nasional menjadi faktor utama hubungan kerja sama Indonesia dan Australia terus berjalan.

4.3.2 Bahasan Bentuk Diplomasi pertahanan Indonesia-Australia Pascakasus Penyadapan tahun 2013 Menurut Cottey & Forster

Diplomasi pertahanan indonesia-australia banyak mengalami dampak yang besar tetapi tidak banyak mengalami perubahan. Kegiatan yang berjalan adalah sesuai dengan rencana kerja sama diplomasi pertahanan yang sudah direncanakan sebelumnya. Kerja sama yang terjalin dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan kearah diplomasi pertahanan yang berkelanjutan. Indonesia dan Australia sepakat untuk menjadi partner dalam meningkatkan kapasitas kekuatan militer mereka. Disamping itu, fungsi diplomasi pertahanan juga memiliki kekuatan untuk mempererat hubungan kedua negara baik dalam urusan militer maupun pemerintahan.

Dalam melihat bentuk diplomasi pertahanan Indonesia-Australia pascakasus penyadapan, peneliti memakai konsep diplomasi pertahanan menurut *Cottey* dan *Forster* (2004). Dalam buku *reshaping defense diplomacy* telah membuat suatu konsep diplomasi pertahanan seperti berikut ini:

Tabel 4.15 Bentuk Diplomasi Pertahanan

No	Bentuk Diplomasi Pertahanan
1	Hubungan bilateral dan multilateral antara senior militer dengan pertahanan sipil
2	Pertemuan atase pertahanan ke luar negeri
3	Persetujuan bilateral kerjasama pertahanan
4	Pelatihan militer dan personil pertahanan sipil luar negeri
5	Pertukaran tenaga ahli manajemen pertahanan
6	Pertukaran personil militer dan unit militer, serta kunjungan kapal
7	Penempatan pesonil sipil atau militer di negara partner
8	Pertukaran tim pelatih
9	Pertukaran alutsista
10	Latihan bersama bilateral atau multilateral

Sumber: *Cottey and Forster* (2004)

Bentuk-bentuk diplomasi pertahanan yang telah dirumuskan diatas dapat membantu melihat apa saja bentuk diplomasi pertahanan Indonesia-Australia pascakasus penyadapan tahun 2013. Berikut analisis peneliti:

Tabel 4.16 Analisis Konsep Diplomasi Pertahanan Indonesia-Australia Pascakasus penyadapan tahun 2013

NO	Konsep Diplomasi Pertahanan	Bentuk Diplomasi Pertahanan Indonesia-Australia
1	Hubungan bilateral dan multilateral antara senior militer dengan pertahanan sipil	Bentuk diplomasi pertahanan Indonesia dan Australia dalam konteks ini dapat terlihat dalam terlaksananya Indonesia Australia <i>Defence Strategic Dialogue</i> (IADSD) dimana dalam pertemuan tersebut tidak hanya melibatkan perwira militer saja akan tetapi terdapat keikutsertaan ofisial, staf, dan akademisi yang membidangi ilmu pertahanan.
2	Pertemuan atase pertahanan ke luar negeri	Dalam pertemuan athan ini bertemu dalam satu forum resmi dan membicarakan isu-isu tertentu seperti yang dilakukan KASAD Jenderal Budiman pada tahun 2014 yang mengumpulkan 32 athan untuk berkumpul termasuk didalamnya Australia pada tahun 2014. Pertemuan athan lainnya banyak pada bidang intelijen dan <i>information sharing</i> . Hal ini berkaitan dengan tugas mereka di Negara mereka bertugas. Akan tetapi didalam bentuk formal regular, atase pertahanan Indonesia dan Australia tidak pernah melakukan pertemuan. Kedua athan ini sering kali bertemu dalam rangka

		pendamping pertemuan menteri pertahanan dalam kerangka 2+2 meeting.
3	Persetujuan bilateral kerjasama pertahanan	Kerja sama Indonesia dan Australia merupakan kerja sama bilateral yang melibatkan untuk militer didalamnya. Kerja sama bilateral ini banyak sekali bentuknya seperti di dalamnya ada <i>Army to Army talks</i> , <i>Navy to Navy Talks</i> , dan <i>Airman to Airman Talks</i> . Kerja sama bilateral lebih sering berupa nota kesepahaman bersama untuk melakukan kegiatan bersama seperti latihan bersama dan patroli terkordinasi, dll.
4	Pelatihan militer dan personil pertahanan sipil luar negeri	Kerja sama Indonesia Australia juga mencakup dengan pelatihan militer kedua Negara yang berfungsi sebagai peningkatan kapasitas masing-masing Negara seperti Komodo exercise, Corpat Ausindo, Latihan new horizon, latma multilateral exercise KAKADU, exercise cassowary, dan lain lain.
5	Pertukaran tenaga ahli manajemen pertahanan	Kerja sama ini dapat dikategorikan seperti pertukaran ahli pertahanan masing-masing Negara seperti ahli pertahanan Australia sebagai pemateri seminar atau sebaliknya. Indonesia juga memiliki kerja sama pertukaran pelajar militer dimana personil militer masing-masing Negara belajar baik di Indonesia maupun di Australia.
6	Pertukaran personil militer dan unit militer, serta kunjungan kapal	Bentuk kerja sama ini banyak sekali dilakukan oleh Indonesia dan Australia. Bahkan kerja sama ini terus berlangsung saat Indonesia dan Australia mengalami masalah. Seperti pertukaran perwira atau

		siswa. Lebih jauh lagi Indonesia dan Australia juga sering melakukan port visit ke masing-masing Negara seperti kunjungan kapal perang HMAS Larakian di pelabuhan tanjung priok Jakarta, HMAS Launceston di Bali, dan HMAS Pirie ke raja ampat. Sedang kunjungan port visit sendiri oleh Indonesia ke Australia adalah kunjungan KRI SIM-367 dan KRI dewaruci ke Jeris bay Australia pada oktober 2013.
7	Penempatan pesonil sipil atau militer di Negara partner	Bentuk kerja sama ini seperti pertukaran perwira untuk belajar di Australia maupun Indonesia ataupun mengikuti kursus singkat dan pelatihan bahasa. Kerja sama Indonesia Australia yang sudah pernah berjalan adalah kartikaburra training, griffin exchange program, Defence Strategic Studies Course (DSSC) / Setara Lemhanas, Australian Command and Staff Course (ACSC) / setingkat Seskoal, Advanced Australian English Language Course (AAELC), dan lain sebagainya.
8	Pertukaran tim pelatih	Kerja sama Indonesia dan Australia sudah lama melibatkan pertukaran pelatih. Pelatih militer Indonesia juga mengajar di militer Australia begitu pula sebaliknya. Lebih jauh lagi banyak sekali tentara Australia yang belajar banyak dari pelatih militer Indonesia di dalam kerangka kerja sama latihan bersama di dalam <i>army to army</i> .
9	Pertukaran alutsista	Indonesia memiliki kerja sama pembelian dengan Australia berupa pesawat C-130

		<p>sebanyak tiga pesawat. Tidak hanya pesawat, Indonesia juga membeli simulator C-130 beserta suku cadangnya. Kerja sama pertukaran alutsista ini adalah sebagai bentuk <i>confidence building measure</i> (CBM) antara kedua Negara. disamping kerja sama pembelian alutsista, Indonesia dan Australia juga memiliki kerja sama dalam hal <i>research and development</i> (R&D) sehingga kedepannya Indonesia mampu mengimbangi dalam hal teknologi pertahanan dengan austrlia.</p>
10	<p>Latihan bersama bilateral atau multilateral</p>	<p>Latihan bersama antara Indonesia dan Australia banyak sekali bentuknya yang sudah dilakukan oleh tiga matra baik darat, laut, maupun udara sehingga kerja sama latihan bersama bilateral sudah menjadi agenda rutin tahunan kerja sama Indonesia dan Australia. Sedangkan untuk kerja sama multilateral Indonesia dan Australia berada dalam forum multilateral seperti WPNS (Western Pacific Naval Symposium), IONS (Indian Ocean Naval Symposium), dan IORA (Indian Ocean Rim Association).</p>

Konsep diplomasi pertahanan yang dirumuskan oleh *Cottey* dan *Firster* menunjukkan bahwa Indonesia dan Australia sudah memenuhi kerja sama bilateral mereka dalam bidang diplomasi pertahanan pascakasus penyadapan tahun 2013. Selanjutnya, diplomasi pertahanan Indonesia dan Australia ini dapat menjadi alat memperkuat hubungan Indonesia dan Australia baik dalam urusan militer maupun urusan

pemerintahan sehingga diplomasi pertahanan dapat dijadikan alat untuk mengurasi permasalahan yang begitu dinamis di antara kedua Negara.

Berdasarkan analisis konsep diplomasi pertahanan yang dirumuskan oleh cottey & forster menunjukkan bahwa hampir semua bentuk diplomasi pertahanan yang dilakukan antara Indonesia dan Australia memenuhi kriteria yang disebutkan meskipun terdapat satu bentuk diplomasi pertahanan yang tidak dapat terpenuhi yakni pertemuan antara atase pertahanan Indonesia dan Australia.

Sedangkan dilihat dari bentuk diplomasi pertahanan Indonesia-Australia sebelum kasus penyadapan dan pascapenyadapan, bentuknya tidak banyak perubahan seperti penjabaran tabel 4.11 dibawah ini:

Tabel 4.17 Perbandingan bentuk diplomasi pertahanan sebelum kasus penyadapan dan pasca penyadapan.

No	Bentuk Diplomasi Pertahanan Indonesia-Australia	Tahun 2013	Tahun 2014-2016
1	Indonesia-Australia Defence Strategic Dialogue (IADSD)	√	√
2	Army to Army Talks	√	√
3	Navy to Navy Talks	√	√
4	Airman to Airman Talks	√	√
5	Kunjungan Perwira Tinggi Indonesia ke Australia	√	√
6	Kunjungan Perwira Tinggi Australia ke Indonesia	√	√
7	H-2 Hydrographic Surveying	√	√
8	Airpower and seapower Conference	√	√
9	Junior officer Combat Instructor	√	√
10	Kursus MIPB-DFSI	√	√
11	Pertukaran Taruna RMC-D dan Taruna Akmil	√	√
12	Kunjungan siswa dan Staf CDSS	-	√

13	Latma DAWN, PEGASUS & GRIFFIN KOMODO	√	√
14	Latma Dusk Magpie dan Crocodile	-	√
15	Latma Wira Jaya Ausindo	√	√
16	Latma Kakadu	√	√
17	Latma Kartikaburra	√	√
18	Kunjungan Kapal Perang HMAS Australia	√	√
19	Latma Rajawali Ausindo	√	√
20	Ausindo HLC	√	√
21	2+2 Meeting	√	√
22	Indo Defence Expo	-	√
23	TNI AU/RAAF Safety and Airworthiness Joint Working Group (JWG)	√	√
24	Latma Cassowary	√	√
25	Latma Corpat	√	√

Sumber: Ikahan (2016)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa bentuk diplomasi pertahanan sebelum kasus penyadapan dan pascakasus penyadapan tidak banyak mengalami perubahan dan masih berjalan sesuai dengan perencanaan yang rumuskan oleh Indonesia dan Australia.

Diplomasi pertahanan Indonesia dan Australia dapat dijadikan acuan baik-buruknya hubungan Indonesia dan Australia. Apabila hubungan Indonesia dan Australia mengalami hambatan, besar kemungkinan juga berdampak pada diplomasi pertahanan Indonesia-Australia. Disamping itu, diplomasi pertahanan Indonesia-Australia sangat penting guna meningkatkan pembangunan kapasitas pertahanan, oleh karena itu diplomasi pertahanan yang terjalin menjadi faktor penting kedua negara menjalin hubungan kerjasama.